

PENERAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2006 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH DI KECAMATAN TALLO KOTA MAKASSAR

Neneng Wahyuni

Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar

E-mail: Nenengwahyuni17@gmail.com

Abstrak

Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Dibimbing oleh Bapak Muhammad Guntur dan Ibu Aslinda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah di Kecamatan Tallo Kota Makassar. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data yang digunakan terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah di Kecamatan Tallo Kota Makassar belum memberikan hasil yang efektif dinilai dari lima kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan 1) Kriteria efektivitas kawasan pendidikan tinggi terpadu telah memenuhi tujuan yang ingin dicapai 2) Kecukupan berupa sarana dan prasana yang masih sangat minim 3) Kriteria pemerataan yang belum terjadi diseluruh kawasan pendidikan tinggi terpadu dikecamatan Tallo 4) Responsivitas yang belum efektif karena belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat 5) Manfaat yang belum bisa di rasakan oleh masyarakat.

1. PENDAHULUAN

Pertambahan penduduk yang terus menerus, memang banyak menjadi beban bila tidak diimbangi dengan perencanaan yang baik. Pertambahan penduduk juga telah menimbulkan berbagai macam polemik. Semua itu dapat dihubungkan dengan berbagai masalah pemenuhan kebutuhan dasar penduduk seperti pangan, perumahan, kesempatan kerja, fasilitas kesehatan, gizi, pendidikan dan sandang. Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah menuntut pemerintah untuk memenuhi sarana dan prasarana bagi masyarakat, salah satunya menyediakan ruang gerak bagi masyarakat.

Beberapa strategi pembangunan perkotaan yang termuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) dan telah dijalankan ditemukan masih terdapat beberapa kelemahan, khususnya dalam pelaksanaan pemanfaatan ruangnya, implementasinya sering terjadi penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. padahal penyelenggaraan penataan

ruang seperti yang tercantum dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dalam Pasal 3 bertujuan untuk Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional; terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya; tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan sejahtera, mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia, meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mewujudkan

keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.¹

Kota Makassar memiliki jumlah penduduk tidak sedikit. Jumlah penduduk yang terus meningkat, tercatat berdasarkan data dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang dilansir oleh situs *berita-sulsel.com* pada tahun 2015 jumlah penduduk kota Makassar berada diangka 1.653.386. Angka tersebut mengalami penambahan sebesar 5.117 ditahun 2016 menjadi 1.658.503 jiwa. Sedang tahun 2017 angka ini kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 111.417.² Sehingga, jumlah penduduk di Kota Daeng hingga Maret 2017 mencapai 1.769.920. Seiring jumlah penduduk yang terus meningkat membuat para penduduk membutuhkan tatanan ruang wilayah yang berkeadilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pola pemanfaatan ruang kota Makassar telah diatur pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2005-2015. Tetapi dalam implementasinya masih terjadi banyak pergeseran peran dan fungsi dari pemanfaatan ruangnya. Hal tersebut menyebabkan peraturan daerah belum terimplementasi dengan baik. Pergeseran tersebut terjadi dalam hal pengaturan tata ruang dan wilayah untuk kawasan pendidikan yang terdapat pada bab IV pasal 9 “Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu, Yang berada pada bagian tengah Timur kota, mencakup wilayah Kecamatan Panakukang, Tamalanrea dan Tallo”. Dengan penjelasan lebih lanjut bahwa kawasan pendidikan tinggi terpadu adalah kawasan tinggi yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap dan saling bersinergi dalam satu sistem ruang yang solid.³

Memperhatikan isi Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2006 tentang Rencana tata ruang

wilayah kota Makassar 2005-2015, bahwa Kec. Tallo merupakan salah satu kawasan pendidikan tinggi terpadu disamping fungsi lainnya bahwa kecamatan Tallo termasuk juga kawasan pergudangan terpadu dan penelitian terpadu. Tetapi tumbuhnya tempat-tempat pertokoan menjadi kontradiksi di wilayah Kecamatan Tallo. Hal tersebut dapat mengakibatkan terjadinya penyimpangan pelaksanaan rencana tata ruang melalui pemanfaatan fungsi ruang komersil yang cukup signifikan di kawasan pendidikan tinggi terpadu Kota Makassar. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Ruang Di Kecamatan Tallo Kota Makassar”

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Konsep Kebijakan

1) Kebijakan

Suharto dalam Suharno (2009: 3) mengatakan bahwa “kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan”. Menurut Jones dalam Suharno (2009: 3), “kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya”.⁴

2) Kebijakan Publik

Anderson dalam Agustino (2006: 7) memberikan pengertian atas definisi kebijakan publik, dalam bukunya *Public Policy Making* sebagai berikut:

Kebijakan Publik adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.⁵

b. Konsep Evaluasi Kebijakan

1) Pengertian evaluasi

Menurut Nawawi (2009: 155), evaluasi merupakan “kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi atau unit kerja dalam melakukan

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang .Pasal 3

² <http://berita-sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-2017/>

³Peraturan Daerah Kota Makassar No.6 Tahun 2006. Pasal 1

⁴Suharno.2009.*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta:Penerbit Ombak. Hal 3

⁵Ibid.hal 7

tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya”.⁶ Dalam melakukan evaluasi hasil agar dikaitkan dengan sumber daya (*input*) manusia, dana/keuangan, sarana-prasarana, metode kerja dan hal-hal yang berkaitan.

Menurut Nawawi (2009: 158) dalam melakukan evaluasi kebijakan publik memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Dengan evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan.
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan.
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu kebijakan.
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun negatif.
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mendeteksi serta mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses kebijakan ke depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik.

2) Tipe dan Pendekatan Evaluasi

Menurut Finance dalam Badjuri & Yuwono (2003: 135) ada empat dasar tipe evaluasi sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai. Keempat tipe ini adalah: “Evaluasi kecocokan (*appropriateness evaluation*), Evaluasi efektivitas (*effectiveness evaluation*), Evaluasi efisiensi (*efficiency evaluation*) dan Evaluasi meta (*meta-evaluation*).⁷

1. Evaluasi kecocokan (*appropriateness*) menguji dan mengevaluasi tentang apakah

kebijakan yang sedang berlangsung cocok untuk dipertahankan? Juga, apakah kebijakan baru dibutuhkan untuk mengganti kebijakan ini? Pertanyaan pokok dalam evaluasi kecocokan ini adalah siapakah semestinya yang menjalankan kebijakan publik tersebut pemerintah atau sektor swasta? Jawaban atas pertanyaan ini memungkinkan penentuan tingkat kecocokan implementasi kebijakan.

2. Evaluasi efektivitas menguji dan menilai apakah program kebijakan tersebut menghasilkan hasil dan dampak kebijakan yang diharapkan? Apakah tujuan yang dicapai dapat terwujud? Apakah dampak yang diharapkan sebanding dengan usaha yang telah dilakukan? Tipe evaluasi ini memfokuskan diri pada mekanisme pengujian berdasar tujuan yang ingin dicapai yang biasanya secara tertulis tersedia dalam setiap kebijakan publik.
3. Evaluasi Efisiensi, merupakan pengujian dan penilaian berdasarkan tolok ukur ekonomis yaitu apakah input yang digunakan telah digunakan dan hasilnya sebanding dengan output kebijakannya? Apakah cukup efisien dalam penggunaan keuangan publik untuk mencapai dampak kebijakan?
4. Meta evaluasi, menguji dan menilai terhadap proses evaluasi itu sendiri. Apakah evaluasi yang dilakukan oleh lembaga berwenang sudah profesional? Apakah evaluasi tersebut sensitif terhadap kondisi sosial, kultural dan lingkungan? Apakah evaluasi tersebut menghasilkan laporan yang mempengaruhi pilihan-pilihan manajerial?.

Untuk pendekatan evaluasi, ada tiga jenis pendekatan terhadap evaluasi sebagaimana dijelaskan oleh Dunn dalam Subarsono (2016: 124), yakni: (1) evaluasi semu; (2) evaluasi formal; (3) evaluasi keputusan teoritis.⁸

- (1) Yang dimaksud evaluasi semu (*pseudoevaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode

⁶ Nawawi. Op.Cit Hal 155

⁷ Abdulkahar Badjuri & Teguh Yuwono. Op.Cit. hal 135

⁸Subarsono 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 124

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan, tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut pada individu, kelompok, atau masyarakat. Asumsi yang digunakan adalah bahwa ukuran tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang terbukti dengan sendirinya (*self evident*) atau tidak kontroversial.

- (2) Evaluasi formal adalah (*formal evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang terpercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan berdasarkan sasaran program kebijakan yang telah ditetapkan secara formal oleh pembuat kebijakan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa sasaran dan target yang ditetapkan secara formal adalah merupakan ukuran yang tepat untuk melihat manfaat atau nilai dari program dan kebijakan.
- (3) Evaluasi proses keputusan teoritis (*decision theoretic evaluation*) adalah pendekatan evaluasi yang menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat dipercaya dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit diinginkan oleh berbagai *stakeholder*. Dalam hal ini, evaluasi keputusan teoritik berusaha untuk menentukan sasaran dan tujuan yang tersembunyi dan dinyatakan oleh para *stakeholder*.

3) Indikator Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya. Indikator atau kriteria evaluasi yang dikembangkan oleh Dunn dalam Subarsono (2016: 126) mencakup lima indikator sebagai berikut:⁹

1. Efektivitas (*effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau

mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.¹⁰

2. Kecukupan (*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.¹¹
3. Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria kesamaan.¹²
4. Responsivitas (*responsiveness*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu.¹³
5. Kriteria ketepatan (*appropriateness*) secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantive, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.¹⁴

Brigman dan Davis dalam Bajuri dan Yuwono (2003: 138) secara umum evaluasi kinerja kebijakan mengacu pada empat indikator pokok yaitu indikator 1. *input*, 2.

⁹ Ibid

¹⁰ William Dunn. 2013. *Pengantar Analisis kebijakan Publik (Edisi kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University. Hal 429

¹¹ Ibid hal 430

¹² Ibid hal 434

¹³ Ibid hal 437

¹⁴ Ibid hal 438

*process, 3. outputs dan 4. outcomes.*¹⁵ Untuk lebih jelasnya diuraikan sebagai berikut:

1. Indikator *input* memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input ini dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.
2. Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.
3. Indikator *outputs* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari system atau proses kebijakan publik.
4. Indikator *outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

c. Konsep tata ruang

Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Setiap wilayah administratif menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan dalam pemanfaatan lahan di wilayahnya.¹⁶

Tata ruang, dengan penekanan “tata” adalah pengaturan susunan ruangan suatu wilayah/daerah (kawasan) sehingga tercipta persyaratan yang bermanfaat secara ekonomi, sosial budayadan politik, serta menguntungkan bagi perkembangan masyarakat wilayah tersebut.

Menurut pasal 7 UU No.24 Tahun 1992 (UUPRL) yang telah diganti dengan UU No.26 Tahun 2007 tentang penataan ruang (UUPR) ada tiga aspek pokok yang dijadikan dasar dalam penataan ruang, yaitu (1) aspek fungsi

utama kawasan; (2) aspek administrasi; (3) aspek kegiatan.¹⁷

(1) Fungsi utama kawasan

Penataan ruang berdasarkan fungsi utama kawasan (Pasal 7 ayat (1) UUPRL) (yang pertimbangan utamanya adalah kondisi ekosistem dan topografinya), kawasan dibagi menjadi dua kategori, yaitu: (a) kawasan lindung; dan (b) kawasan budi daya.

Kawasan lindung, termasuk di dalamnya yaitu kawasan hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sekitar danau/waduk, sekitar mata air, kawasan suaka alam, termasuk pada laut dan perairan lainnya, kawasan pantai/bakau, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, dan kawasan rawan bencana alam.

Kawasan budi daya, termasuk didalamnya yaitu kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan permukiman, industry, kawasan berikat (berlaku ketentuan khusus berkaitan dengan kepabeanaan), kawasan pendidikan, pertahanan keamanan, dan kawasan pariwisata serta kawasan peribadatan.

(2) Aspek administratif

Penataan ruang berdasarkan aspek administratif (wilayah), ruang yang dengan sendirinya juga tata ruang dibagi ke dalam kelompok secara vertikal, yaitu: (a) ruang wilayah nasional; (b) ruang wilayah propinsi; dan (c) ruang wilayah kabupaten dan kota Pasal 7 ayat (2) UUPRL. Penjelasan pasal ini menyatakan cukup jelas. Dengan dasar dan pendekatan penataan ruang ini, maka tata ruang secara hierarkis meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK), dengan pengertian bahwa, RTRW ini harus dilaksanakan secara terpadu dan tidak terpisah-pisahkan. Menurut Glasson dalam Tarigan (2012:11) ada dua cara pandang yang berbeda tentang wilayah, yaitu subjektif dan objektif. Cara pandang subjektif, yaitu wilayah adalah alat untuk mengidentifikasi suatu lokasi yang didasarkan atas kriteria tertentu atau tujuan tertentu. Pandangan objektif menyatakan

¹⁵ Badjuri & Yuwono. Op.Cit hal 138

¹⁶Hasni. Op.cit. hal 53

¹⁷Ibid.Hal 90

wilayah itu benar-benar ada dan dapat dibedakan dari ciri-ciri/gejala alam disetiap wilayah.¹⁸

(3) Fungsi kawasan dan aspek kegiatan (sebagai satu kesatuan)

Dalam pasal 7 ayat (3) UUPRL dikatakan bahwa: “Penataan ruang fungsi kawasan dan aspek kegiatan meliputi kawasan perdesaan, kawasan perkotaan, dan kawasan tertentu.

d. Kerangka Konseptual

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dengan keberhasilan dalam menciptakan tata ruang yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Hal tersebut juga telah diatur dalam Peraturan Daerah mengenai cara menciptakan tatanan ruang yang berwawasan lingkungan yang berlandaskan pada Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Secara garis besar evaluasi merupakan sebuah proses untuk menentukan sejauhmana keberhasilan sebuah program/kegiatan. Implementasi perda tersebut merupakan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh lembaga eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Kota Makassar. Strategi rancangan yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2006 itu, secara teknis dan administratif, diturunkan lagi kepada Dinas Tata Ruang Kota Makassar. Evaluasi digunakan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan.

Sehingga dalam penelitian ini, ingin mengetahui sejauh mana evaluasi kebijakan perda Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar. Pada penelitian ini untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan menggunakan indikator evaluasi yang dikemukakan oleh Dunn (1994).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan penelitian ini tentang hasil pelaksanaan rencana tata ruang wilayah terkhusus pada kawasan pendidikan tinggi terpadu di kecamatan Tallo. Berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 kawasan pendidikan tinggi terpadu adalah kawasan terpadu yang diarahkan dan diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan

pengembangan berbagai kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yang saling bersinergi dalam satu system ruang yang solid.

Kecamatan Tallo termasuk dalam kawasan pendidikan tinggi terpadu (termasuk kecamatan Tamalanrea dan kecamatan Panakukkang). Misi kawasan pendidikan tinggi terpadu adalah meningkatkan fungsi kawasan sebagai pusat pendidikan tinggi dengan standar global, image yang baik dan atmosfer akademik yang tinggi, membatasi kegiatan pemanfaatan ruang yang bertentangan dengan fungsi utama kawasan, menata kawasan kosong sekitar kawasan sungai Tallo dengan model pemanfaatan ruang berbasis lingkungan yang berstandar global, serta mendorong tumbuhnya ruang-ruang pendukung kawasan. Untuk mewujudkan misi pembangunan kota yang dimaksud tersebut maka strategi pengembangan tata ruang kawasan pendidikan terpadu yang terdapat pada pasal 12 huruf h ayat 2 yaitu mendorong pembangunan sentra-sentra bisnis pendidikan, permukiman asrama, sarana rekreasi dan sarana perpustakaan serta dekat dengan kawasan penelitian terpadu sebagai kegiatan pendukung fungsi utama kawasan. Serta luas ruang terbuka hijau yang terdapat pada pasal 15 nomor 8 e yaitu melestarikan taman-taman lingkungan yang terdapat dalam kawasan kampus dan permukiman penduduk serta pengadaan RTH Umum melalui program perbaikan lingkungan, peremajaan di beberapa kawasan. Evaluasi mengenai perda nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah kota dengan studi kasus kawasan pendidikan tinggi terpadu dapat dilihat dengan lima indikator yaitu:

1. Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat tercapai semakin efektif kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Dunn “efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan”. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai

¹⁸ Prof. Drs. Robinson Tarigan, M.R.P.. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta:PT Bumi Aksara. Hal 111

moneternya.¹⁹ Dalam hal pencapaian tujuan dari peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kota Makassar terkhusus untuk kawasan pendidikan tinggi terpadu, ada banyak rencana yang tentunya ingin dicapai yaitu terpenuhinya kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pendidikan tinggi yang dilengkapi dengan kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap yaitu terpenuhinya pembangunan sentra-sentra bisnis sarana perpustakaan, permukiman dan asrama.

Dalam peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 dinyatakan bahwa dalam suatu kawasan pendidikan tinggi terpadu diperuntukkan sebagai kawasan dengan pemusatan dan pengembangan berbagai kegiatan pendidikan terpadu serta kegiatan-kegiatan penunjang yang lengkap. Sedangkan hasil yang diperoleh dari penelitian bahwa misi strategis yang ada pada perda telah terpenuhi, hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kegiatan penunjang lengkap dikawasan pendidikan tinggi terpadu.

2. Kecukupan

Kecukupan untuk melihat sejauh mana kebijakan atau program mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan adanya rencana tata ruang wilayah dimana kebijakan tersebut untuk mencapai penataan kota yang teratur serta nyaman untuk masyarakat. Berdasarkan peraturan daerah kecukupan dalam kawasan pendidikan tinggi terpadu dapat dilihat dari terpenuhinya sarana dan prasarana yang ada dikawasan tersebut. Sarana dan prasarana yang menjadi indikator efektifnya sebuah kebijakan yaitu strategi pengembangan kawasan pendidikan tinggi terpadu.

Dunn mengemukakan bahwa “kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah”.²⁰ Kriteria kecukupan dalam kawasan pendidikan tinggi terpadu belum efektif karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dikawasan tersebut, tingkat efektivitas yang memuaskan kebutuhan belum tercapai. Hal tersebut disebabkan karena bergesernya fungsi utama kawasan. Hasil

wawancara menegaskan bahwa seorang *planner* harus mampu melaksanakan tugas yang telah direncanakan.

3. Pemerataan

“Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya, biaya moneter) secara adil didistribusikan.”²¹ Dalam hal pemerataan dapat dilihat melalui sarana dan prasarana apakah telah merata diseluruh kawasan pendidikan tinggi terpadu dikecamatan Tallo. Tetapi jika dilihat dari kriteria kecukupan diatas belum terpenuhi karena beralih fungsinya kawasan sehingga dapat disimpulkan juga bahwa sarana dan prasarana belum secara merata ada dikawasan pendidikan tinggi terpadu dikecamatan Tallo. Untuk penunjang kawasan pendidikan tinggi terpadu hanya ada beberapa hal yaitu permukiman yang berupa perumahan dosen dan pembangunan sentra bisnis yaitu tempat fotocopy sedangkan sarana rekreasi dan sarana perpustakaan belum terpenuhi di kawasan pendidikan tinggi terpadu.

4. Responsivitas

Responsivitas menurut Dunn berkenaan dengan “seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok masyarakat tertentu.”²² Responsivitas kawasan pendidikan tinggi terpadu harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat diantaranya yaitu terciptanya fungsi utama kawasan dengan secara lengkap terpenuhinya kegiatan-kegiatan penunjang yang ada. Kegiatan penunjang yang diantaranya adanya pembangunan sentra-sentra bisnis pendidikan, permukiman, asrama, sarana rekreasi dan sarana perpustakaan serta pengadaan ruang terbuka hijau. Permasalahan yang sama juga dikemukakan oleh rencana strategis kecamatan Tallo bahwa terdapat pemukiman kumuh dan padat penduduk yang hingga tahun 2019 masih menjadi tugas pemerintah. Kriteria responsivitas belum efektif karena ada beberapa hal kegiatan penunjang yang belum tercapai diantaranya kurangnya ruang terbuka hijau dan asrama .

¹⁹ William Dunn. Loc.Cit hal 429

²⁰ Ibid hal.430

²¹ Ibid hal 434

²² Ibid hal 437

Kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yaitu kebutuhan dalam kawasan pendidikan tinggi terpadu. Tetapi kebutuhan tersebut belum terpenuhi yang disebabkan karena adanya ketidaksesuaian antara yang direncanakan dan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan kurangnya kedisiplinan baik dari masyarakat ataupun dari pelaksana kebijakan.

5. Ketepatan

Kriteria ketepatan ini menganalisis tentang manfaat dari suatu kebijakan, yakni apakah hasil yang dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat. Menurut Dunn ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Kriteria ketepatan menurut Dunn mempertanyakan apakah tujuan kebijakan tepat untuk suatu masyarakat indikator ketepatan tidak berkenaan dengan satu kriteria tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama, kriteria yang dimaksud ialah ketepatan indikator-indikator sebelumnya yaitu efektivitas, kecukupan, pemerataan dan responsivitas. Indikator untuk melihat hasil dari kebijakan rencana tata ruang wilayah yaitu terciptanya tatanan ruang yang sesuai dengan fungsi utama kawasan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa kriteria berupa kecukupan, pemerataan dan responsivitas tidak terpenuhi. Sedangkan untuk melihat tingkat keberhasilan ketepatan, indikator-indikator lainnya harus terpenuhi.

4. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai penerapan peraturan daerah, maka dapat disimpulkan bahwa peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 belum terlaksana dengan baik, hal ini dibuktikan dengan:

Efektivitas peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 telah efektif karena terpenuhinya tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai yaitu misi strategis kawasan pendidikan tinggi terpadu. Indikator kedua yaitu kecukupan belum terpenuhi karena sarana dan prasarana yang masih minim di kawasan pendidikan tinggi terpadu. Hal tersebut disebabkan karena kawasan yang seharusnya menjadi tempat

sebagai kegiatan penunjang pendidikan tetapi beralih fungsi menjadi kawasan bisnis. Indikator pemerataan belum efektif. Hal tersebut disebabkan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi dikawasan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kriteria kecukupan yang belum terpenuhi. Indikator responsivitas yang belum efektif hal tersebut disebabkan karena belum terpenuhinya kebutuhan yang telah disebutkan di peraturan daerah. Salah satunya yaitu minimnya ruang terbuka hijau dikawasan tersebut. Indikator terakhir ketepatan yaitu manfaat yang dihasilkan dari kebijakan peraturan daerah. Untuk mencapai indikator ketepatan, maka indikator efektivitas, kecukupan, pemerataan dan responsivitas harus terpanuhi. Tetapi indikator-indikator tersebut tidak efektif terlaksana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perda nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah dengan studi kasus dikawasan pendidikan tinggi terpadu dikecamatan Tallo belum berjalan secara efektif. Belum efektifnya peraturan daerah yang telah berjalan salah satunya disebabkan karena tidak adanya kerjasama antara pemerintah yang melaksanakan kebijakan dan masyarakat yang menjadi sasaran dalam kebijakan.

b. Implikasi

Hasil penelitian tentang evaluasi kebijakan peraturan daerah nomor 6 tahun 2006 tentang rencana tata ruang wilayah merupakan bukti ilmiah akan pentingnya perencanaan tata ruang, agar kedepannya nanti masyarakat bisa merasakan suatu kawasan yang nyaman dalam hal pendidikan.

c. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan. Dalam upaya pelaksanaan rencana tata ruang pemerintah mampu menjalankan suatu kebijakan yang bukan hanya diatas kertas tetapi juga mampu mengimplementasikannya. Dalam upaya mencapai suatu kebijakan yang diinginkan juga tidak bisa hanya satu pihak yang berperan aktif tetapi juga harus ada dukungan dari masyarakat dalam menjalankan suatu kebijakan. Sehingga kebijakan yang telah ditetapkan bisa berjalan sesuai keinginan.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu harus memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal sarana dan prasarana yang telah disebutkan dalam peraturan daerah.

5. REFERENSI

Buku

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah
- Afiffuddin. 2010. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung : ALFABETA
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- . 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Badjuri, Abdulkahar & Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik Konsep dan Strategi*. Semarang: Universitas Diponegoro
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RINEKA CIPTA
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group
- Dunn, William. 2013 . *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (Edisi Kedua)*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Hasni. 2016. *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPPLH Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kountur, Ronny. 2003. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta Pusat: Penerbit PPM
- Kusumanegara, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit PMN
- Nugroho, Riant. 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Parsons, Wayne. 2005. *Public Policy "Pengantar teori dan praktik analisis kebijakan"*. Jakarta: Kencana
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Suharto, Edi. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Cetakan Ke-25
- Sugandi Y.S. 2011. *Administrasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cetakan I
- Suharno. 2009. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- Tarigan, Robinson. 2012. *Perencanaan Pembangunan Wilayah Edisi Revisi*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wahid, Yunus. 2014. *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Presindo.

Skripsi

- Kurniawan, Akbar. 2015. Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota Makassar. Makassar: Universitas Hasanuddin
- Maslan.2017. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Tugas Kepala Desa Didesa Waji Kecamatan Tellusia Tingnge Kabupaten Bone). Makassar: Universitas Negeri Makassar
- Rully Pradana Putera. 2012. Evaluasi Kebijakan Trans Pakuan di Kota Bogor. Depok: Universitas Indonesia
- Tedi Hermawan. 2012. Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kecamatan Kragilan.Serang:Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang Kurniawan Akbar.2015.Implementasi Kebijakan Tata Ruang tentang Kawasan Pendidikan Tinggi Terpadu Di Kota Makassar.Makassar:Universitas Hasanuddin

Sumber Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Peraturan Daerah Kota Makassar No.6 Tahun
2006 Tentang Tata Ruang Kota
Makassar

Internet dan Sumber lainnya

[http://berita-sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-](http://berita-sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-2017/)

[2015-hingga-2017/](http://berita-sulsel.com/2017/03/31/data-jumlah-penduduk-makassar-tahun-2015-hingga-2017/). Diakses pada 8
Desember 2017 pukul 22:26

[https://id.wikipedia.org/wiki/Kota](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar) . Diakses
Pada 17 Februari 2017 pukul 14:58